

RUANG PUBLIK KOTA DAN POLA KOMUNIKASI WARGANYA

Ch.Herutomo

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fisip Unsoed

Email: christoherutomo@gmail.com

ABSTRACT

Arrangement of urban public space that takes into account social, cultural, economic and characteristic aspects of urban citizens will affect the pattern of urban citizens communication that is anonymity. The anonymity nature of the citizens of this city is due to the very heterogin city residents consisting of ethnic background, religion, socioeconomic status and interests. The anonymity of the townspeople causes a tendency for citizens to communicate with people or groups with similar backgrounds and interests. Communication citizens who have the background and interests of the same this will lead to the pattern of communication that is the primary of personal communication, informal and expressive. This pattern of primary communication can be at the individual level such as family communication as well as group level such as communication in organizations that use city public space.

Keywords: city public space, communication pattern

PENDAHULUAN

Ruang publik kota merupakan ruang yang dapat mewadahi kepentingan publik untuk melakukan komunikasi keluarga, pertemuan informal komunitas, tempat bermain anak-anak atau tempat rekreasi keluarga. Stephen Carr (1992) mengungkapkan bahwa ruang publik bisa berupa taman umum dari skala nasional, hingga regional, alun-alun yang ada di setiap kota atau taman kota. Sebagai salah satu elemen kota, ruang publik kota dapat berperan sebagai pemberi karakter tersendiri, memiliki fungsi untuk komunikasi bagi warga kota, kegiatan ekonomi, apresiasi

budaya, sekaligus dapat meningkatkan kualitas ruang dalam kota.

Kebutuhan ruang publik kota sangat penting untuk warga kota, karena berkaitan langsung dengan kultur warga kota. Kegiatan warga kota yang terus berubah, kelompok sosial yang semakin terfragmentasi, sementara lahan di perkotaan semakin mahal. Maka ruang publik kota harus digunakan secara efisien melalui penggunaan secara multiguna, fleksibel untuk semua kelompok usia dan sosial ekonomi, yang mampu menyamakan adanya ketimpangan sosial di antara warga kota.

RUANG PUBLIK KOTA DAN POLA KOMUNIKASI WARGANYA

Seharusnya, ruang-ruang publik kota yang dibangun selalu memberi kenyamanan bagi warga kota dalam berbagai situasi. Tetapi realitanya, ruang publik kota sering lengang dan kurang nyaman karena terkesan kumuh akibat sampah yang berserakan, pedagang kaki lima yang kurang diatur dan adanya *Gepeng* (gelandangan dan pengemis). Proporsi untuk kawasan ruang publik kota idealnya tiga puluh persen dari luas wilayah lahan suatu kota, maka setiap kota diwajibkan melakukan penataan terhadap kawasan ruang publik yang disusun dalam Rencana Tata Ruang Kota (RTRK).

Kriteria ruang publik yang ideal menurut Cars Stephen (1992) harus memenuhi tiga syarat yaitu (1) responsif: dalam arti ruang publik kota harus dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas (2) demokratis: berarti ruang publik seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta aksesibel bagi berbagai kondisi fisik manusia (3) bermakna berarti ruang publik kota dapat memiliki kaitan warga kota dalam konteks sosial budayanya. Ruang publik kota sebagai sarana komunikasi warga kota dapat menjaga dan meningkatkan kualitas kapital sosial, yaitu sikap kompromi dan toleransi antar warga kota. Realitanya

keberadaan ruang publik kota di Indonesia khususnya di Pulau Jawa lama kelamaan semakin berkurang, digantikan oleh mal, pusat-pusat perbelanjaan, dan ruang-ruang bersifat privat lainnya.

Setiap warga tanpa membedakan jenis kelamin, faktor usia, kaya atau miskin, faktor pendidikan, dapat menggunakan ruang publik kota untuk segala macam kegiatan mulai dari kegiatan individual, keluarga atau berkelompok. Secara langsung dari segi finansial, ruang publik kota tidak memberi kontribusi yang besar pemerintah kota, tetapi ruang publik kota tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu fasilitas yang harus ada dan pendukung kawasan perkotaan.

Mal atau pusat-pusat perbelanjaan yang banyak tumbuh di kota-kota besar sekarang ini tidak dapat menggantikan keberadaan ruang publik kota. Meski dewasa ini tempat-tempat tersebut ada fasilitas untuk bermain anak, lokasi pertemuan, bertukar informasi, atau sekadar sebagai tempat rekreasi. Meskipun terbuka untuk umum, mal atau pusat perbelanjaan tetap menampilkan wajah yang privat dan eksklusif, yang hanya orang-orang tertentu saja yang berpenghasilan lebih yang dapat sering mengunjungi mal atau pusat perbelanjaan.

Tidak adanya komunikasi sosial sebagai prasyarat bagi penguatan kapital sosial seperti sikap kompromi dan toleransi warga kota, merupakan alasan utama mengapa ruang publik kota tidak dapat digantikan oleh mal atau pusat perbelanjaan. Tumbuhnya ruang publik kota sejalan dengan kebutuhan manusia dalam melakukan kegiatan bersama, seperti berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya.

Berbagai dimensi kehidupan warga kota sebagai pengguna ruang publik membutuhkan kepuasan dan kenyamanan, baik secara sosial, biologis, psikologis, maupun fisik, maka kualitas ruang publik harus mampu merespons semua aspek kebutuhan warga kota tersebut. Setiap penataan ruang publik selalu dipengaruhi adanya kepentingan dan keinginan warga kota. Penataan ruang publik kota akan berhasil maksimal apabila aspirasi dan nilai-nilai budaya warga kota mendapat perhatian utama dalam menentukan kebijakan dalam penataan ruang publik kota. Oleh karena itu, untuk menata ruang publik kota pertama-tama harus ditentukan lebih dulu aksesibilitasnya, nilai strategisnya dan nilai-nilai sosial budaya warga kota.

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan

ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi sosial, budaya, dan lingkungan. Penataan ruang publik perlu langkah sosialisasi dengan melakukan komunikasi dengan warga kota secara berkala agar dapat menyerap keinginan dan aspirasi warga kota sebagai pengguna fasilitas ruang publik tersebut. Secara empiris seringkali ruang publik tidak dimanfaatkan secara optimal oleh warga kota karena tidak sesuai dengan keinginan dan aspirasi warga kota.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut tulisan ini akan membahas mengenai: “Bagaimana keterkaitan penataan tata ruang publik kota dengan pola komunikasi warganya?”

TINJAUAN PUSTAKA

Ruang Publik Kota

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat 1, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan pengertian ruang menurut Tarigan

(2005) adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara; termasuk di dalamnya lahan atau tanah, air, udara, dan benda lainnya, serta daya dan keadaan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Pada umumnya, ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan warga kota. Ruang publik ini memungkinkan terjadinya pertemuan antar warga untuk berkomunikasi dalam berbagai kegiatan bersama baik tingkatan keluarga maupun kelompok.

Menurut Eko Budihardjo (1998), ruang publik adalah bagian dari ruang yang memiliki definisi sebagai wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik. Ruang publik memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai tempat bermain dan berolahraga, tempat bersantai, tempat komunikasi sosial, tempat peralihan, dan tempat menunggu.

Ruang publik kota (Mulyani, 2000) meliputi taman, lapangan, ruang hijau kota, pedestrian dan ruang terbuka lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh publik. Ruang publik kota dalam ruang perkotaan adalah semua

bagian jaringan perkotaan yang dapat diakses secara fisik dan visual oleh masyarakat umum, termasuk jalan, taman dan plaza/lapangan/alun-alun. Disamping itu ruang publik kota dapat memberikan karakter kotanya, dan pada umumnya memiliki fungsi komunikasi sosial bagi masyarakat, kegiatan ekonomi rakyat dan tempat apresiasi budaya.

Menurut Stephen Carr (1992) tipologi ruang publik kota dibagi menjadi beberapa tipe dan karakter. (1) Taman Umum (*publik park*), yang meliputi taman nasional (*national park*), taman pusat kota (*downtown parks*), taman lingkungan (*neighborhood park*), dan taman kecil (*mini park*). (2) Lapangan dan Plasa (*squares and plazas*), meliputi lapangan pusat kota (*central square*) yang biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan formal seperti upacara peringatan hari nasional. (3) Peringatan (*memorial*), yakni ruang publik yang digunakan untuk memperingati memori kejadian penting bagi masyarakat, baik tingkat lokal maupun nasional. (4) Pasar (*markets*), yakni ruang terbuka atau ruas jalan yang digunakan untuk pasar yang bersifat temporer atau pada hari tertentu.

Ruang publik kota menurut Tibbals, Francis (2001) memiliki nilai yang sangat strategis, yaitu: (1) ruang publik kota merupakan pelengkap dan pengontras bentuk

kota (*urban*); (2) bentuk dan ukuran ruang publik kota merupakan suatu determinan utama bentuk kota, (3) ruang publik kota merupakan salah satu elemen fisik kota yang dapat menciptakan kenyamanan warga kota; dan (4) ruang publik kota mengangkat nilai kemanusiaan, karena dalam ruang publik kota warga kota dengan berbagai kegiatan dan berkomunikasi.

Ruang publik menurut Car Stephen (1992) dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar. (1) ruang publik sebagai sumber produksi, antara lain perhutanan, produksi mineral, peternakan, pengairan, dan lain-lain. (2) ruang publik sebagai perlindungan, misalnya cagar alam, daerah budaya, dan sejarah. (3) ruang publik untuk kesehatan dan kenyamanan, antara lain untuk melindungi kualitas air, pengaturan pembuangan air dan sampah, memperbaiki dan mempertahankan kualitas udara, rekreasi, taman lingkungan, taman kota, dan sebagainya.

Kegiatan warga kota yang dapat dilakukan pada ruang publik kota ini antara lain untuk sarana komunikasi warga kota melalui kegiatan rekreasi dan hiburan, dapat juga sebagai kegiatan industri wisata, misalnya pameran pembangunan, kegiatan promosi

wisata, dan kebudayaan yang menarik pengunjung. Penelitian Ir. Prihastoto, MT tentang Kajian Kualitas Ruang Publik Alun-Alun Kota Purworejo menyimpulkan alun-alun sebagai ruang publik belum memenuhi fungsinya yang optimal tingkat *responsibility* terhadap aspek *needs*, *democraticity* terhadap aspek *rights*, dan tingkat *meaningfully* yaitu sebagai sarana komunikasi sosial, hubungan antar kelompok, hubungan antaretnis dan karakter kota.

METODE PENULISAN

Tulisan ini merupakan studi literasi yang akan mendiskripsikan apa yang menjadi tujuan penulisan dengan melakukan kajian beberapa literatur yang berkaitan dengan komunikasi lingkungan, masalah perkotaan, psikologi sosial dan lingkungan. Dengan studi literasi ini memungkinkan penulis dapat mengkaji dan mendalami pokok permasalahan secara komprehensif dan dapat mengambil kesimpulan obyektif dan akurat.

PEMBAHASAN

Kaitan Ruang Publik Kota dengan Tata Ruang

Kaitan antara ruang publik kota dengan tata ruang diatur dalam sebuah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat 2 sampai

5 yang bunyinya sebagai berikut: (ayat 2): tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, (ayat 3): struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional, (ayat 4): pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya, (ayat 5): penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tarigan (2005) mendefinisikan penataan ruang wilayah sebagai perencanaan penggunaan/pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Perencanaan ruang wilayah pada dasarnya adalah menetapkan ada bagian-bagian wilayah yang dengan tegas diatur penggunaannya dan ada bagian-bagian wilayah yang kurang/t diatur penggunaannya. Perencanaan pemanfaatan ruang wilayah adalah agar pemanfaatan itu dapat memberikan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Konsep Penataan Ruang Publik Kota

Ruang publik kota dapat mempertemukan seluruh warga dengan latar belakang ekonomi, budaya dan status sosial warga kota. Kegiatan warga kota di ruang publik kota dapat merefleksikan secara jelas bagaimana dinamika komunikasi sosial warga kota.

Sebelum menentukan penataan ruang publik kota, harus diketahui apa yang menjadi tujuan dalam penataan tersebut, maka menurut Tarigan(2005) ada tiga kategori dasar perencanaan ruang publik kota yakni: (1) mengakomodir kebutuhan-kebutuhan warga kota, (2) peraturan-peraturan yang dapat melindungi pengembangan kota, dan (3) komunikasi sosial budaya yang terjalin dengan baik di antara warga kota.

Penataan ruang publik kota adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang. Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keberdayagunaan, keserasian, keselarasan keseimbangan dan keberlanjutan. Penataan ruang publik kota juga harus berwawasan lingkungan sebagai sarana untuk pengembangan wilayah kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga kotanya.

Hildebrand Frey (1999) mengaitkan kebutuhan warga kota dengan kebutuhan dasar manusia pada hirarkhi Maslow sebagai berikut:

- 1) Pada tingkatan dasar (*basic level*), fasilitas kota yang disediakan adalah semua kebutuhan fisik masyarakat, antara lain: tempat tinggal dan tempat kerja, pendapatan yang memadai, pendidikan, transportasi dan sarana komunikasi.
- 2) Pada tingkatan kedua, hal-hal yang harus diperhatikan oleh kota adalah keselamatan (*safety*), keamanan (*security*), dan perlindungan (*protection*), bagi warga kota.
- 3) Tingkatan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi warga kota seperti sarana pendidikan, sosial dan budaya yang bisa mencerahkan warga kota.
- 4) Tingkatan yang keempat, bahwa fasilitas kota harus memberikan kesan yang cocok (*appropriate image*), reputasi yang baik, serta memberi gengsi bagi warga kota.
- 5) Pada tingkat kelima, fasilitas kota harus dapat memberi kesempatan penghuninya untuk berkreasi sendiri, membentuk ruang untuk berekspresi bagi warga kota.

Pada umumnya kota adalah suatu permukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial. Rapoport (2003) menambahkan 10 kriteria secara lebih spesifik untuk merumuskan kota sebagai berikut; (1) ukuran dan jumlah penduduknya yang besar terhadap massa dan tempat, (2) bersifat permanen, (3) kepadatan minimum terhadap massa dan tempat, (4) struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukkan oleh jalur jalan dan ruang-ruang perkotaan yang nyata, (5) tempat di mana masyarakat tinggal dan bekerja, (6) fungsi perkotaan minimum yang diperinci, yang meliputi sebuah pasar, sebuah pusat administratif atau pemerintahan, sebuah pusat militer, sebuah pusat keagamaan, atau sebuah pusat aktivitas intelektual bersama dengan kelembagaan yang sama, (7) heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hierarkhis pada masyarakat (8) pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah pertanian di tepi kota dan memproses bahan mentah untuk pemasaran lebih luas, (9) pusat pelayanan (*services*) bagi daerah-daerah lingkungan setempat, (10) pusat penyebaran, memiliki suatu falsafah hidup perkotaan pada massa dan tempat itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, dari kegiatan utama kota itu sering menjadi *landmark* kota.

Menurut Kevin Lynch dalam Budiharjo (1999) *landmark* adalah salah satu elemen pokok dalam membangun citra kota. *Landmark* merupakan elemen penting dari bentuk kota karena membantu orang untuk mengorientasikan diri di dalam kota dan membantu mengenal suatu daerah kota. Sebuah *landmark* yang baik adalah elemen yang tegas tetapi harmonis dengan kerangka lingkungan. Ruang publik kota dengan berbagai aktivitas warganya dapat menjadi sebuah *landmark* bagi kota tersebut, seperti Jakarta *landmark*-nya Taman Monas yang merupakan ruang publik kota.

Pola Komunikasi Warga Kota Dan Masalahnya

Pola adalah bentuk atau model yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu bagan. Sedangkan

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola dapat diartikan sebagai sistem, cara kerja atau bentuk. Bila dikaitkan dengan ilmu komunikasi, maka pola komunikasi dapat diartikan sebagai proses dan bentuk komunikasi yang tetap, bagaimana sebuah pesan atau informasi dapat dipahami oleh khalayak. Menurut Rogers (1986) pola komunikasi mempunyai tiga fungsi menggambarkan proses komunikasi, menunjukkan hubungan yang visual dan memperbaiki hambatan komunikasi.

Menurut Morgan (1986), pola komunikasi dalam masyarakat sukar dinilai baik buruknya yaitu karena harus disesuaikan dengan norma masyarakatnya sendiri sehingga mencerminkan kebutuhan masyarakatnya. Morgan (1986) menemukan bahwa untuk masyarakat perkotaan, memiliki pola komunikasi yang disebutnya sebagai pola *Com-Con* singkatan dari *completely connected*. Dalam *completely connected structure* terdapat pada umumnya orang-orang di dalamnya merasa terlibat dan bebas, tidak tergantung dari orang lain. Dalam hubungan ini, anggota masyarakat lebih bebas untuk memilih dengan siapa mereka hendak berkomunikasi.

Sebagai ruang aktivitas warganya, kota memiliki luas wilayah yang relatif tetap, bahkan berkurang. Artinya, tanah-tanah yang

semula menjadi permukiman penduduk sekarang telah beralih fungsi menjadi pusat perkantoran dan perdagangan. Konsekuensinya, kota tidak mampu lagi menyediakan tempat hunian layak bagi penghuninya. Disparitas yang lebar antara ketersediaan ruang perkotaan dan pertumbuhan penghuninya yang melaju tanpa kendali secara sosial berdampak pada munculnya fenomena kepadatan atau *density* dan secara individual akan menimbulkan fenomena kesesakan atau *crowding*.

Jika kesesakan berlangsung dalam waktu yang lama, kesejahteraan subjektif individu akan terancam yang dapat berujung pada gangguan-gangguan psikologis, seperti stres dan depresi. Dalam kajian psikologi lingkungan (Bell, 2001) adaptasi terkait dengan kepadatan spasial ini ada pendekatan teritorialitas yaitu pendekatan yang berorientasi pada pembentukan kawasan geografis untuk mencapai tingkat privasi optimal. Usaha yang lazim digunakan adalah dengan merencanakan seting lingkungan atau pindah ke lokasi lain. Keterbatasan pendekatan ini adalah bersifat statis-tidak ekspansif-karena berbasis pada struktur ruang yang definitif.

Menurut Tibbalds Francis (2001) parameter umum yang dapat dijadikan acuan, apakah sebuah kota itu nyaman dihuni atau

tidak, terletak pada sejauh mana kota tersebut memiliki daya dukung bagi aktivitas warganya. Semakin kota memiliki daya dukung yang tinggi bagi aktivitas warganya, maka kota tersebut dapat dikatakan sebagai kota yang nyaman.

Tibbalds Francis (2001) memandang kota sebagai suatu bagian masyarakat keseluruhan (*as a part of society as a whole*) dan semua perubahan-perubahan masyarakat akan selalu tercermin di dalam kota. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut ciri-ciri kehidupan sosial dari sifat yang dianggap “primitif tradisional” sampai ke sifat-sifat gaya hidup modern. Perubahan-perubahan tersebut selalu meningkat skalanya dan oleh (Bell, 2001) peningkatan skala ini disebut sebagai “*constructs*” (suatu produk yang mencerminkan daripada perubahan skala gaya hidup). Ada 3 macam ekspresi “*constructs*” yang jelas terlibat yaitu: (1) *social rank* (jenjang sosial); (2) *urbanization* (urbanisasi) dan (3) *segregation* (segregasi).

Parameter kota menurut Tibbalds Francis (2001) dapat dilihat juga secara sosio-budayanya, kota secara tradisional menekankan pada hubungan dalam kelompok, rasa kebersamaan, komunikasi tatap muka, dan budaya homogen. Sedangkan kota modern

cenderung memberi penekanan pada individu sebagai unit, peranan dalam masyarakat terpisah-pisah, dan budaya bersifat heterogen.

Cars Stephen (1992) Ideologi kota-kota yang terencana (*planned cities*) pada awalnya dimulai di wilayah *Fertile Crescent* sebagai karya budaya dari bangsa Summeria dan Assyria, yang selanjutnya dianggap embrio dari peradaban manusia, atau dengan kata lain kota bisa merefleksikan budayanya. Di samping itu, ada ideologi lain lingkungan sosial yang ideal diekspresikan melalui lingkungan fisik yang ideal, artinya ideologi ini berusaha menggabungkan antara idealisme sosial dengan fisik dalam penataan kota. Rencana kota yang dibuat merupakan bentuk fisik dari konsep-konsep tentang kota yang didasarkan pada interpretasi masalah-masalah sosial. Pendapat bahwa lingkungan fisik akan mengakibatkan dampak lingkungan sosial merupakan argumentasi yang kuat yang mendasari ideologi ini. Menurut Amos Rapoport(2001) ada tiga pengaruh lingkungan fisik terhadap manusia; (1) *environmental determinism*, artinya lingkungan fisik mempengaruhi persepsi dan tingkah laku manusia, (2) *environmental possibilism*, artinya lingkungan fisik dapat memberikan kesempatan/hambatan terhadap tingkah laku manusia, dan (3) *environmental probabilism*,

artinya lingkungan fisik memberikan banyak pilihan bagi tingkah laku manusia.

Komunikasi antarpribadi akan efektif bila pertemuan komunikasi dapat menyenangkan bagi komunikan (Istiyanto, 2015). Apabila orang berkomunikasi dalam kelompok dan merasa senang, maka komunikasinya akan bertahan lama. Bahwa komunikasi akan lebih efektif apabila proses komunikasi antar warga saling menyenangkan. Atau paling tidak setelah ada komunikasi antar warga kota terjadi perubahan sikap atau perilaku yang menyenangkan. Perubahan sikap dan perilaku individu terjadi karena – apa yang lazim disebut dalam psikologi sosial sebagai–pengaruh sosial yaitu konformitas dan polarisasi.

Morgan (1986), (1) konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju (norma) kelompok sebagai akibat tekanan kelompok – yang riil atau yang abstrak. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pengaruh norma kelompok pada konformitas anggota-anggotanya bergantung pada ukuran mayoritas anggota kelompok, makin banyak anggotanya, makin tinggi tingkat konformitas. (2) polarisasi ada anggapan yang kuat bahwa dalam kelompok, individu menjadi kurang berani, kurang kreatif, dan kurang inovatif. Kelompok cenderung

digunakan untuk menghindari resiko. Anggapan lain individu justru cenderung membuat keputusan yang lebih berani ketika mereka berada dalam kelompok daripada ketika mereka sendirian.

Untuk menata ruang publik kota, diperlukan penelitian tentang perilaku warga kota baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya, dengan demikian ruang publik akan didesain sesuai dengan sikap dan perilaku atau kebiasaan warga kota. Sehingga, kehadiran ruang publik baik dalam bentuk konfigurasi, ragam, ornamen, tata letak, taman dan lain-lain bisa diakrabi oleh warga kota.

Penataan ruang publik juga harus memperhatikan unsur-unsur nonfisik seperti nilai sosial budaya warga kota sebagai satu kesatuan unsur yang membentuk kualitas kota, sehingga keberadaan ruang publik tidak akan terlepas dari aktivitas warga kota yang terkait dalam konteks sosial budaya. Maka menurut Cars Stephen (1992) memerlukan pemahaman tentang kultur dan karakter warga kota yang menjadi ciri khasnya sebelum menata ruang publik. Dengan memahami kultur dan karakter warga kota dalam menata ruang publik akan mempengaruhi pola komunikasi warga kota yang dimanifestasikan dalam proses komunikasi individu seperti dalam komunikasi keluarga atau komunikasi kelompok seperti

organisasi keagamaan maupun organisasi masyarakat yang sering menggunakan ruang publik kota untuk beraktivitas.

Ciri warga kota menurut Budiarto (1999) yang salah satunya bersifat anonimitas yang pada umumnya warga kota menghabiskan waktunya di tengah kumpulan manusia yang anonim. Anonimitas warga kota dengan keanekaragaman dari segi ras, etnisitas, kepercayaan, pekerjaan, maupun kelas sosial. Akibat anonimitas ini warga kota akan cenderung lebih banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang dan kepentingan yang sama.

KESIMPULAN

1. Penataan ruang publik kota yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan (responsif) oleh berbagai warga kota dalam berbagai latar belakang sosial ekonomi budaya (demokratis) dan bisa mengkaitkan warga kota dalam konteks sosial budayanya (bermakna). Apabila unsur-unsur itu dapat terpenuhi maka ruang publik kota dapat merupakan elemen kota yang dapat menciptakan kenyamanan dan mengangkat nilai – nilai kemanusiaan warga kota, karena warga kota dapat bertemu dan

RUANG PUBLIK KOTA DAN POLA KOMUNIKASI WARGANYA

berkomunikasi ditengah kepadatan dan kesesakan atau crowding kota yang dapat menimbulkan stress.

2. Penataan ruang publik kota yang sesuai dengan kultur dan karakter warga kota maka ruang publik kota dapat mengakomodir kepentingan sosial ekonomi budaya warga kota yang bersifat anonimitas. Sifat anonimitas tersebut karena warga kota terdiri dari berbagai latar belakang agama, suku, status sosial ekonomi, kelompok kepentingan. Kondisi ini menimbulkan kecenderungan warga kota

berkomunikasi dengan orang yang punya latarbelakang dan kepentingan yang sama.

3. Kecenderungan warga kota berkomunikasi dengan orang yang punya latarbelakang dan kepentingan yang sama dalam ruang publik kota akan menimbulkan pola komunikasi primer dan *completely connected* yaitu proses komunikasi yang bersifat personal, informal, ekspresif, *spontan dan bebas pada tingkatan komunikasi keluarga maupun komunikasi organisasi.*

DAFTAR PUSTAKA

- Bell, Paula, 2001, *Environmental Psychology*, Harcourt College Publisher. New York
- Budiharjo, Eko dan Djoko Sujarto. 1999. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Alumni
- Cars, Stephen, et al. 1992. *Publik Space*. USA: Cambridge University Press
- Frey, Hildebrand. 1999. *Designing The City, A More Sustainable Urban*. USA
- Istiyanto, S. Bakti. 2015. *Komunikasi Antarpribadi*. Purwokerto: Literasi Bangsa.
- Morgan Clifford. 1996. *Psikologi Sebuah Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Mulyani, Hesti, 2000, "Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Kota" dalam Studi Urban (*Seri Kajian Ilmiah, vol. 9 no. 3*), Semarang: Lemlit Universitas Katolik Soegijapranata
- Prihastoto. 2000. "Kajian Kualitas Ruang Publik Alun-Alun Kota Purworejo (*Seri Kajian Ilmiah, vol. 10*)", Semarang, Lemlit Universitas Katolik Soegijapranata
- Rapoport, Amos.. 2003 "Tentang asal-usul kebudayaan permukiman". Karangan di: *Pengantar Sejarah Perencanaan Perkotaan*. Bandung,
- Rogers, M. 1986. *Communication Technology, The New Media In Society*, The Free Press, New York.

- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tibbalds, Francis, 2001, *Making People Friendly Towns: Improving the Publik Environment in Town and Cities*, London, Spon Press
- Tubss, Stewart L., dan Sylvia Moss. 1996. *Human Communication: Prinsip-Prinsip Dasar*. Penerjemah: Deddy Mulyana dan Gembirasari. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Trancik Roger, 1986. *Urbans Space*. Van Nostrand Reinhold CO, New York
- West, Richard dan Lynn H. Turner. 2003. *Introducing Communication Theory*. USA: McGraw-Hill